

**ANALISIS POLITIK DAN TATA KELOLA DAERAH OTONOM:
STUDI PERTIMBANGAN PENGHAPUSAN KOTA SOLOK DAN
PARIAMAN GUNA MENCAPAI TUJUAN PEMBENTUKAN DAERAH**

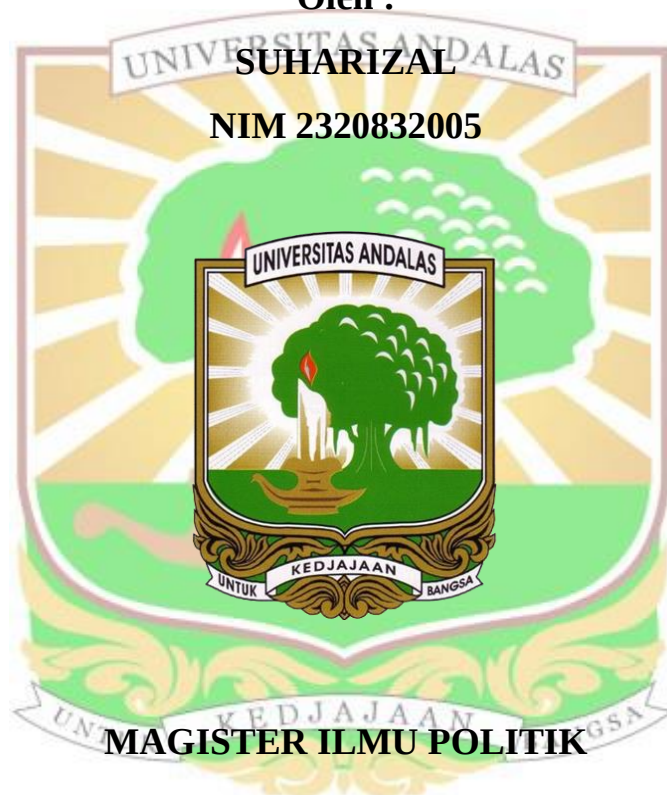
TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Politik pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Oleh :

SUHARIZAL

NIM 2320832005



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

ABSTRAK

Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mencapai tujuan desentralisasi yang optimal. Salah satu isu yang mencuat adalah urgensi penghapusan daerah otonom, terutama di Kota Solok dan Kota Pariaman, yang menghadapi masalah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta pelaksanaan pemerintahan yang efisien. Meskipun kedua kota tersebut memiliki potensi ekonomi, seperti sektor pariwisata di Kota Pariaman, keduanya masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat yang menunjukkan ketergantungan terhadap sumber daya eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendasari penghapusan atau penggabungan daerah otonom di Kota Solok dan Kota Pariaman, dengan menggunakan teori evaluasi kinerja daerah dan konsep penghapusan daerah otonom. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi kedua kota adalah rendahnya kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, ketergantungan pada dana pusat, serta terbatasnya daya saing ekonomi daerah. Meskipun Kota Pariaman memiliki potensi sektor pariwisata, kurangnya perbaikan dalam aspek tata kelola pemerintahan dapat menjadi alasan untuk mempertimbangkan penggabungan dengan daerah lain. Begitu juga dengan Kota Solok yang membutuhkan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mengurangi ketergantungan pada anggaran pusat. Temuan ini menunjukkan bahwa untuk mencapai tata pemerintahan yang lebih baik dan berkelanjutan, penghapusan atau penggabungan daerah otonom perlu dipertimbangkan melalui evaluasi yang menyeluruh dan berbasis pada kinerja dan kemampuan daerah.

Kata Kunci: Otonomi daerah, Desentralisasi, *Good Governance*.



ABSTRACT

The implementation of regional autonomy in Indonesia faces significant challenges in achieving optimal decentralization goals. One of the emerging issues is the urgency of the abolition of autonomous regions, particularly in Solok City and Pariaman City, which are struggling to improve public service quality, community welfare, and efficient governance. Although both cities have economic potential, such as the tourism sector in Pariaman, they are still dependent on transfer funds from the central government, indicating a reliance on external resources. This study aims to analyze the factors underlying the abolition or merging of autonomous regions in Solok City and Pariaman City, using regional performance evaluation theory and the concept of autonomous region abolition. This research uses a descriptive qualitative method. The results show that the main challenges faced by both cities are low governance performance, dependence on central government funds, and limited economic competitiveness. While Pariaman City has potential in the tourism sector, the lack of improvement in governance could be a reason to consider merging with other regions. Similarly, Solok City needs to enhance its financial management capacity to reduce dependence on central budget allocations. These findings suggest that, in order to achieve better and more sustainable governance, the abolition or merging of autonomous regions should be considered through comprehensive evaluation based on the performance and capabilities of the regions.

Keywords: *Regional Autonomy, Decentralization, Good Governance.*

